



MEMBANGUN KETERAMPILAN RESOLUSI KONFLIK MELALUI PKN DENGAN PENDEKATAN MULTIKULTURAL DI SMK NU TEMANGGUNG

Rhindra Puspitasari^{1a)}, Bunyamin Maftuh^{2b)}, Elly Malihah^{3c)}

¹STAINU Temanggung, Jalan Suwandi Suwardi Km 1, Temanggung, (0293) 493361

^{2,3}Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Setia Budi No 229, Bandung, (022) 2013163

e-mail: ^{a)}rhindra.puspitasari@upi.edu, ^{b)}bmaftuh@yahoo.co.id, ^{c)}ellyms@upi.edu

Received: 20 Juni 2020

Revised: 24 Juni 2020

Accepted: 24 Juni 2020

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana membangun keterampilan resolusi konflik melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan multikultural yang dilakukan di SMK NU Temanggung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya konflik yang terjadi dimasyarakat kita, sehingga perlu membangun ketrampilan resolusi konflik bagi generasi muda, salah satunya adalah siswa SMK NU Temanggung. Siswa SMK yang nantinya akan langsung diserap oleh dunia kerja dan terjun ke masyarakat penting dibekali dengan keterampilan resolusi konflik. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan triangulasi metode melalui dua siklus. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada siklus satu menunjukkan bahwa keterampilan resolusi konflik yang dimiliki siswa kelas XI sebanyak 40% dan diperlukan tambahan materi dan metode, sedangkan pada siklus dua setelah ditambah materi dan metode pendekatan multikultural keterampilan resolusi konflik siswa kelas XI meningkat sebanyak 75%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang berarti.

Kata Kunci: pendekatan multikultural, resolusi konflik, PKn.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how to build conflict resolution skills through Citizenship Education subjects with a multicultural approach conducted at SMK NU Temanggung. This research is motivated by the rampant conflicts that occur in our community, so it is necessary to build conflict resolution skills for the younger generation, one of them is SMK NU Temanggung students. Vocational students who will be directly absorbed by the world of work and enter the community are important to be equipped with conflict resolution skills. This research is a classroom action research with descriptive qualitative method. Data analysis was performed by method triangulation through two cycles. The findings in this study indicate that in cycle one shows that conflict resolution skills possessed by class XI students by 40% and additional material and methods are needed, whereas in the second cycle after the material and multicultural approach methods added to conflict resolution skills of class XI students increased by 75%. This shows a significant increase.

Keywords: multicultural approach, conflict resolution, civic education.

PENDAHULUAN

Konflik tidak dapat dihindari manusia, selama manusia bernafas tentu akan mengalami konflik. Manusia memang pada dasarnya memiliki kecenderungan berkonflik antara satu dengan yang lainnya, dan selalu berusaha pula untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Karena hakekat tersebut manusia selalu dihadapkan dengan banyak konflik, terlebih konflik yang terjadi di masyarakat, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal (Susan, 2010).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, masyarakat Indonesia terbagi atas lapisan-lapisan kelas sosial yang terbentuk dengan sendirinya dan sudah seharusnya ada dalam struktur sosial masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk, sehingga memunculkan keanekaragaman dalam berbagai aspek yang juga menyebabkan adanya lapisan sosial yang beragam. Struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan dua cirinya yang bersifat unik, jenis pelapisan masyarakat Indonesia ialah pelapisan secara horizontal dan pelapisan secara vertikal. Pelapisan horizontal di indikasikan dengan adanya perbedaan ras, agama, serta adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Sedangkan pelapisan vertikal di indikasikan dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang didasarkan atas tingkatan ekonomi dan tingkatan-tingkatan lain seperti pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Pelapisan secara vertikal dalam masyarakat Indonesia dinilai cukup mengkhawatirkan dengan adanya kesenjangan yang begitu kentara antara lapisan atas dan lapisan bawah. Keadaan ini pula yang menjadikan Indonesia selalu dihadapkan pada potensi konflik dalam masyarakatnya. Konflik yang dapat terjadi dalam dua macam, yaitu konflik yang bersifat ideologis, dan konflik yang bersifat politis.

Konflik adalah suatu proses antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain

dengan cara menghancurkannya atau membuatnya menjadi tidak berdaya. Konflik itu sendiri merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat maupun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggota atau antar kelompok masyarakat lainnya, konflik itu akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik yang dapat terkontrol akan menghasilkan integrasi yang baik, namun sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan suatu konflik (Sapho, 2013). Sebuah konflik yang tersembunyi, dapat berubah menjadi sebuah konflik terbuka, ketika struktur-struktur sosial yang terdiri dari kerangka nilai dan norma yang ada, sudah tidak lagi mampu meringkai kekuatan kepentingan yang terdominasi atau ketika terjadi perubahan keseimbangan kekuatan di mana ada pihak yang merasa cukup kuat untuk melakukan aksi peniadaan pihak lawan secara fisik.

Dalam kondisi demikian, setiap peristiwa sosial sehari-hari berpotensi menjadi pemicu bagi meledaknya sebuah konflik sosial terbuka. Kecepatan berubahnya sebuah konflik tersembunyi menjadi konflik terbuka, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti, proses globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi informasi, tingkat pendidikan, serta kesenjangan antar generasi. Ketika sebuah konflik sudah menjadi konflik terbuka, biasanya sudah terlambat untuk ditangani dan juga sudah menelan korban dan kerugian, tidak saja bagi pihak-pihak yang bertikai, tetapi juga dialami oleh kelompok masyarakat lainnya.

Pemerintah mencatat angka peristiwa konflik horizontal yang terjadi di daerah pada tahun 2013 menurun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2012). Dalam tahun 2013 sampai dengan awal Desember ini, ada 85 peristiwa konflik, lebih rendah dibanding tahun 2012 yaitu 128 peristiwa konflik (Kemendagri, 2013). Data lain tentang maraknya konflik yang terjadi dapat dilihat dari Laporan Survei Kriminal BPS tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Podes (Potensi Desa) 2018, perkelahian antar kelompok warga

merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, disusul oleh perkelahian warga antar desa/kelurahan. Persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian antar kelompok warga sebesar 1,71 persen di tahun 2014 meningkat menjadi 1,99 persen di tahun 2018.

Data di atas jelas menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia masih sangat marak dan keterampilan resolusi konflik jelas sangat diperlukan masyarakat. Mengingat Indonesia sebagai negara yang sangat multikultural, hal ini bisa dilihat dari jumlah pulau yang begitu banyak membuat masyarakat Indonesia semakin multikultur. Pada dewasa ini, telah terjadi beberapa kasus intoleran yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Muqoyyidin (2013) menjelaskan bahwa konflik-konflik yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang arti keragaman dan perbedaan sehingga dapat menyebabkan peniadaan kebhinekaan (*plurality*) dan bergeser ke arah ketunggalan dan keseragaman (*uniformity*). Tilaar mengemukakan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah masalah yang bersifat mendasar karena berkesinambungan dengan penentuan nasib hidup atau matinya sebuah negara bangsa Indonesia (Praptini, 2010).

Untuk mewujudkan cita-cita mulia di atas, bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu penting adanya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat plural. Pendidikan multikultural dapat dilakukan salah satunya melalui mata pelajaran PKn.

Pendidikan Kewarganegaraan pada era sekarang ini memiliki enam misi diantaranya: (1) PKn sebagai pendidikan politik; (2) PKn sebagai pendidikan nilai; (3) PKn sebagai pendidikan nasionalisme; (4) PKn sebagai pendidikan hukum; 5) PKn sebagai pendidikan multicultural; dan (6) PKn sebagai pendidikan resolusi konflik (Maftuh, 2008) . Oleh karena itu, penelitian

untuk mengetahui bagaimana membangun keterampilan resolusi konflik melalui mata pelajaran PKn dengan menggunakan pendekatan multicultural perlu dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian tindakan kelas atau yang sering disebut dengan *class room action research*. Terdapat beberapa siklus dalam penelitian ini. Namun pada penelitian ini menggunakan dua siklus. Dari masing-masing siklus akan dianalisa sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Waktu Penelitian dilakukan awal Agustus 2019 sampai akhir Desember 2019. Tempat penelitian adalah di SMK NU Temanggung pada mata pelajaran PKn di kelas XI. Subjek Penelitian Subjek penelitian ini yakni semua siswa kelas XI pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Prosedur penelitian menggunakan model penelitian yang dikembangkan oleh Yudhistira (2013) dengan langkah atau alur penelitian meliputi: (a) Perencanaan; (b) Pelaksanaan; (c) Observasi; dan (d) Refleksi. Pada Pelaksanaan tindakan terdapat dua siklus. Setiap siklus meliputi tiga tahapan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Setelah pelaksanaan tindakan dilakukan observasi. Tujuan observasi ini adalah proses pelaksanaan pembelajaran. Dengan mencari tahu kekurangan dan kelebihan dari tiap siklusnya yang dapat dijadikan perbaikan pada siklus berikutnya. Tahapan berikutnya adalah refleksi.

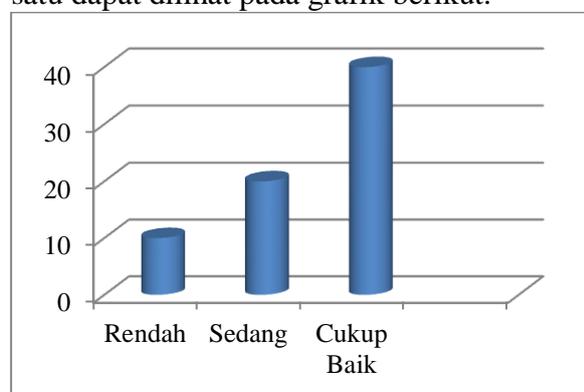
Pada tahapan ini, perlu untuk membandingkan nilai hasil dari masing-masing siswa, apakah nantinya ada perbedaan antara siswa yang aktif dalam pembelajaran dengan yang tidak. Di sisi lain juga diamati bagaimana kesesuaian penggunaan metode peta konsep dengan nilai siswa. Apabila hasil yang diperoleh belum memuaskan, maka diterapkan kembali rencana tindakan untuk pokok pelajaran berikutnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan

penggunaan tes. Tes tersebut digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan resolusi konflik siswa. Sementara, observasi digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran di kelas. Teknik Analisis Data menggunakan Model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, pemaparan data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga menggunakan kuantifikasi dari hasil tes yang dilaksanakan agar dapat dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tepatnya disebut dengan analisis deskriptif dengan presentase. Analisa deskriptif dilakukan dengan memberikan gambaran pelaksanaan tindakan dan hasil yang diperoleh. Peneliti melakukan triangulasi data agar data yang diperoleh memiliki keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan keterampilan resolusi konflik pada siswa adalah Kurikulum 2013. Hasil penelitian tindakan kelas yang diperoleh pada siklus satu dapat dilihat pada grafik berikut.



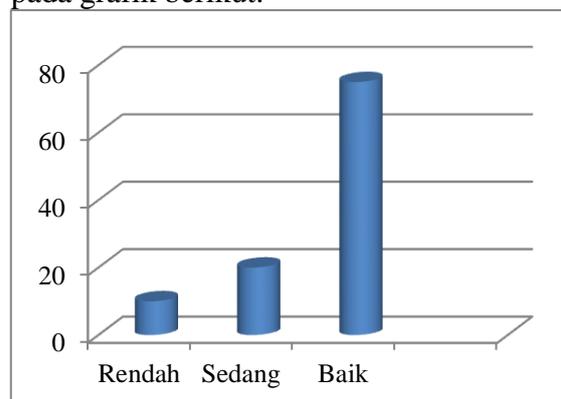
Grafik 1. Keterampilan Resolusi Konflik Siswa Pada Siklus 1

Dalam tahap pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus I, hanya 40% siswa yang memiliki keterampilan resolusi konflik sehingga dapat dikatakan bahwa perbaikan belum berhasil. Data tersebut diperoleh dari keterampilan siswa mencari solusi alternatif sebuah permasalahan dan memilih solusi yang paling efektif dari permasalahan tersebut. Masih terdapat sebagian besar siswa yang belum

memahami dan memiliki keterampilan resolusi konflik sehingga hasil belajarnya tentang keterampilan resolusi konflik juga belum dapat dikatakan baik. Oleh sebab itu langkah-langkah perbaikan keterampilan resolusi konflik siswa kelas XI SMK NU Temanggung yang dilakukan masih membutuhkan revisi untuk dapat dilakukan pada siklus berikutnya. Dalam siklus 2 guru memperbaiki materi dari siklus I. Dengan cara menambahkan materi tentang tata cara menyelesaikan konflik dengan pendekatan multikultural salah satunya memfasilitasi siswa agar menemukan strategi pemecahan masalah, berfikir kritis dan bersikap toleran. Strategi pemecahan masalah yang dilakukan yaitu untuk menyelesaikan secara mufakat atau memadukan kebutuhan-kebutuhan kedua belah pihak.

Selain itu, guru melalui pendekatan multikultural menambahkan metode pembelajaran dengan bermain peran pada kasus konflik yang kemudian harus didiskusikan bersama. Salah satu penerapan bermain peran adalah siswa diberikan suatu kasus tentang konflik etnis tertentu dengan masyarakat dan diberikan tugas untuk memerankan terjadinya konflik tersebut.

Dengan kegiatan ini terdapat peningkatan terhadap keterampilan resolusi konflik siswa. Data menunjukkan bahwa sebesar 75% siswa memiliki keterampilan resolusi konflik sehingga naik 35% dari siklus I. Hasil dari siklus II dapat dilihat pada grafik berikut.

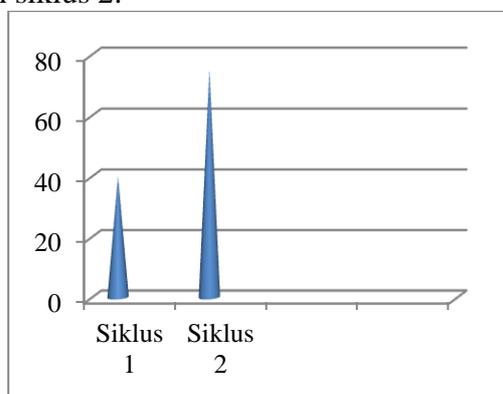


Grafik 2. Keterampilan Resolusi Konflik Siswa pada Siklus II

Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan

resolusi konflik siswa pada siklus 2 yaitu dengan memaksimalkan kegiatan diskusi kelompok untuk memecahkan kasus dan bermain peran sebagai mediator dan orang-orang yang berkonflik. Contoh kasus salah satunya adalah konflik kelompok siswa etnis tertentu dengan masyarakat sekitar. Pada materi meminimalkan kesulitan siswa dalam memahami soal, sehingga siswa lebih mudah dalam memfokuskan pada pertanyaan. Hal ini disebabkan materi yang disampaikan lebih membutuhkan penguasaan teori secara mendalam dan penggunaan keterampilan berpikir kritis dalam menyikapi suatu informasi yang ada (Dewi, 2009).

Sesuai dengan proses pendekatan multikultural yang membiasakan siswa menyelesaikan kasus-kasus soal, menjadikan siswa memiliki keterampilan dan ketangkasan serta terbiasa dalam mengerjakan soal dan tidak memerlukan banyak waktu dalam menyelesaikan soal (Rahayu, 2009). Hasil kegiatan perbaikan siklus 1 dan siklus 2 dapat dilihat dalam grafik 3 pada grafik tersebut dapat diketahui perbedaan pemahaman dan keterampilan resolusi konflik mahasiswa antara siklus 1 dan siklus 2.



Grafik 3. Keterampilan Resolusi Konflik Siklus 1 dan Siklus 2

Setelah melihat grafik keterampilan resolusi konflik siswa pada siklus 1 dan siklus 2, bisa dilihat bahwa penambahan materi melalui pendekatan multikultural dapat meningkatkan kemampuan resolusi konflik yaitu dengan berfikir kritis. Kegiatan belajar mengajar yang konvensional akan menciptakan kondisi belajar hafalan (*rote learning*) jika kegiatan

tersebut tidak menekankan pada upaya pengembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa sangat mudah melupakan materi yang telah dipelajari sebelumnya (Redhana, dan Liliyasi, 2008). Oleh karenanya, seorang pendidik harus bisa mengarahkan dan menggali potensi yang ada pada diri siswa, sehingga siswa mampu mengembangkan beberapa keterampilan tertentu diantaranya keterampilan berpikir kritis melalui penerapan pendekatan, model, atau metode yang tepat dalam kegiatan pembelajaran.

Keterampilan berpikir kritis akan muncul dalam diri siswa apabila selama proses belajar di dalam kelas, guru membangun pola interaksi dan komunikasi yang lebih menekankan pada proses pembentukan pengetahuan secara aktif oleh siswa (Darmawan, 2010). Lebih lanjut, Kriteria berpikir kritis dikelompokkan dalam lima indikator yaitu: (1) klasifikasi dasar (*elementary clarification*); (2) memberikan alasan untuk suatu keputusan (*the basic of the decision*); (3) menyimpulkan (*inference*); (4) klarifikasi lebih lanjut (*advanced clarification*); (5) dugaan dan keterpaduan (*strategi and tactic*) (Afrizon, 2012). Evolusi sekolah transformasi konflik berpusat pada empat asumsi yang ditemukan dalam resolusi konflik. (a) Pihak-pihak yang terlibat konflik bersifat rasional; (b) Mispersepsi merupakan penyebab utama konflik; (c) Prinsip resolusi konflik berlaku diseluruh pengaturan sosial. Istilah transformasi konflik memiliki makna lebih luas. Hal itu ditunjukkan dengan tidak hanya mencegah dan mengakhiri sesuatu yang kurang baik melainkan juga memulai sesuatu yang baru dan baik. Selain itu dalam resolusi dapat ditemukan teori permainan. Teori permainan adalah studi sistematis pemecahan masalah dalam kasus di mana setidaknya dua pihak yang saling terkait terlibat dalam mencari beberapa hasil. Ini digunakan terutama oleh para ekonom untuk mempelajari perilaku pemecahan masalah manusia. Pada akhirnya, konflik-konflik antarkelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan,

sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Pendidikan berparadigma multikulturalisme tersebut penting, sebab akan mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama. Meskipun demikian, Banks (2009) menjelaskan tentang paradigma multikultural yang marak digadag-gadang sebagai langkah alternatif dalam mengelola masyarakat multikultur seperti di Indonesia tampaknya menjadi wacana belaka.

Gagasan ini belum mampu dilaksanakan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah dalam tindakan praksis. Dalam melaksanakan pendidikan multikultural ini mesti dikembangkan prinsip solidaritas yaitu kesiapan untuk berjuang dan bergabung dalam perlawanan demi pengakuan perbedaan yang lain dan bukan demi dirinya sendiri. Solidaritas menuntut agar masyarakat melupakan upaya-upaya penguatan identitas, melainkan menuntut agar berjuang demi dan bersama yang lain.

Dengan berlaku demikian, kehidupan multikultural yang dilandasi kesadaran akan eksistensi diri tanpa merendahkan yang lain diharapkan segera terwujud. Pendekatan multikultural dilaksanakan dengan cara memasukkan ke dalam mata pelajaran dengan memanfaatkan keragaman peserta didik sehingga tidak dalam bentuk pembelajaran yang terpisah. Pelaksanaan model pembelajaran berbasis multikultural ditujukan agar peserta didik dapat memahami, menghormati, menghargai dan bertoleransi terhadap keragaman. Sehubungan dengan hal tersebut, guru membantu peserta didik mengembangkan sikap positif terhadap keragaman.

Tujuan pembelajaran berbasis multikultural yaitu membentuk masyarakat yang berwawasan budaya dan keragaman sehingga dapat menghargai, bertoleransi, dan menghormati keragaman. Materi yang

diajarkan mengandung nilai kultural. Oleh sebab itu guru dapat memasukan contoh budaya, etnis dan keragaman lainnya ke dalam pembelajaran dan membantu peserta didik untuk memahaminya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus menjadi sinergi dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam pendidikan multikultural, tidak akan ada perbedaan kebutuhan, baik yang bersifat intelektual, spritual, material, emosional, etika, estetika, sosial, ekonomi, budaya, dan transendental dari seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai ragam stratanya.

Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan, maka pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola berbagai kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan (Mazid dan Prabowo, 2020). Pendidikan multikultural mengandaikan sekolah dan kelas dikelola sebagai suatu simulasi arena hidup nyata yang plural, terus berubah dan berkembang. Institusi sekolah dan kelas adalah wahana hidup dengan pemeran utama peserta didik disaat guru dan seluruh tenaga kependidikan berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran dikelola sebagai dialog dan pengayaan pengalaman hidup unik, sehingga bisa tumbuh pengalaman dan kesadaran kolektif setiap warga dan peserta didik yang kelak menjadi dasar etika politik berbasis etika kewargaan.

Pendidikan multikultural didasari konsep kebermaknaan perbedaan secara unik pada tiap orang dan masyarakat. Kelas disusun dengan anggota kian kecil hingga tiap peserta didik memperoleh peluang belajar semakin besar sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif di antara peserta didik. Pada tahap lanjut menumbuhkan kesadaran kolektif melampaui batas teritori kelas, kebangsaan dan nasionalitas, melampaui teritori teologi keagamaan dari tiap agama berbeda.

Gagasan itu didasari asumsi, tiap manusia memiliki identitas, sejarah, lingkungan, dan pengalaman hidup unik dan berbeda-beda. Perbedaan adalah identitas terpenting dan paling otentik tiap manusia daripada kesamaannya. Kegiatan belajar-mengajar bukan ditujukan agar peserta didik menguasai sebanyak mungkin materi ilmu atau nilai, tetapi bagaimana tiap peserta didik mengalami sendiri proses berilmu dan hidup di ruang kelas dan lingkungan sekolah. Karena itu, guru tidak lagi ditempatkan sebagai aktor tunggal terpenting sebagai kamus berjalan yang serba tahu dan serba bisa.

Guru yang efisien dan produktif ialah jika bisa menciptakan situasi sehingga tiap peserta didik belajar dengan cara sendiri yang unik. Kelas disusun bukan untuk mengubur identitas personal, tetapi memperbesar peluang tiap peserta didik mengaktualkan kedirian masing-masing. Pendidikan sebagai transfer ilmu dan nilai tidak memadai, namun bagaimana tiap peserta didik menemukan dan mengalami situasi beriptek dan berkehidupan otentik.

SIMPULAN

Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada siklus satu menunjukkan bahwa keterampilan resolusi konflik yang dimiliki siswa kelas XI sebanyak 40% dan diperlukan tambahan materi dan metode, sedangkan pada siklus dua setelah ditambah materi dan metode pendekatan multikultural keterampilan resolusi konflik siswa kelas XI meningkat sebanyak 75%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang berarti. Pendekatan multikultural yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan sangat efektif dalam rangka meningkatkan keterampilan resolusi konflik siswa kelas XI SMK NU Temanggung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih yang teramat penulis sampaikan kepada buah hati penulis pertama yaitu Raditya Rasheed Setiyawan

yang tercinta serta suami penulis pertama yaitu Agus Setiyawan. Terimakasih penulis ucapkan kepada SMK NU Temanggung, khususnya kelas XI. Terimakasih juga untuk guru pembimbing mata kuliah resolusi konflik. Dan tak lupa terimakasih juga untuk Tim redaksi jurnal Kalacakra sehingga tulisan sederhana ini dapat dimuat dan semoga memberi manfaat bagi para siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizon, R, *dkk.* (2012). Peningkatan perilaku berkarakter dan kemampuan berfikir kritis Siswa kelas IX MTsN Model Padang Pada Mata Pelajaran IPAFISIKA menggunakan model Based instruction. *Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika, Vol. 1(1). Hlm. 1-16.* DOI: <https://doi.org/10.1234/jppf.v1i1.598>
- Banks, James A. (2009). *The routledge international companion to multicultural education. —(Routledge international handbook series).* Washington: Taylor & Francis e-Library.
- Darmawan. (2010). Penggunaan Pembelajaran Berbasis Masalah Dalam meningkatkan Kemampuan berfikir Kritis siswa Pada Mata Pelajaran IPS MI Darussadah Pandeglang. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 11 (2). Hlm. 106-117.* http://jurnal.upi.edu/file/3_darmawan.pdf
- Dewi, A. (2009). *Penerapan Model Pembelajaran BIOCOTS berbantuan media CIA untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan kognitif siswa.* Semarang: FMIPA.
- Maftuh, Bunyamin. (2008). *Pendidikan Resolusi Konflik.* Program Studi Pkn Sekolah Pascasarjana UPI; Bandung.
- Mazid, Sukron dan Wahyu Prabowo, (2020). Strategi Dakwah Jamaah Kopdaryah Dalam Merawat Kebhinekaan. *Civic Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial*

- Budaya*, Vol 4(1). Hlm. 327-336.
DOI:
<https://doi.org/10.31597/cc.v4i1.179>
- Muliawan, J. (2010). *Penelitian Tindakan Kelas (Class Room Action Research)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. (2013). Membangun kesadaran inklusif multikultural untuk deradikalisasi pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2(1). Hlm. 131-151. DOI:
<https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.131-151>
- Praptini. (2010). Peranan Pendidikan Multikultural dalam Menanamkan Pendidikan Nilai untuk Membentuk Masyarakat yang Menghargai Budaya Bangsa. *Generasi Kampus*, Vol. 3 (2). Hlm. 1-19.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/download/7002/5994>
- Rahayu, K. P. (2009). Efektifitas Penerapan Metode Kasus Menggunakan Media Audio Visual terhadap hasil belajar Kimia Siswa SMA. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, Vol. 3 (1). Hlm. 345-353.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JIPK/article/download/1264/1315>
- Redhana, IW & Liliasari. (2008). Program Pembelajaran Keterampilan Berfikir Kritis Pada Topik Laju Reaksi Untuk Siswa SMA. *Forum Kependidikan*, Vol. 27 (2). Hlm. 103-112.
<http://forumkependidikan.unsri.ac.id/userfiles/Artikel%20I%20Wayan%20Redhana-Liliasari%20UPG&UPI%20%28OK%29-ok-nian.pdf>
- Spaho, Kenan. (2013). Organizational, Communication and Conflict Management. *Management*, Vol. 18 (1). Hlm. 103-118.
<https://hrcak.srce.hr/file/153271>
- Susan, Novri. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Yudhistira, D. (2013). *Menulis Penelitian Tindakan Kelas APIK (Asli Perlu Konsisten)*. Jakarta: Grasindo.